

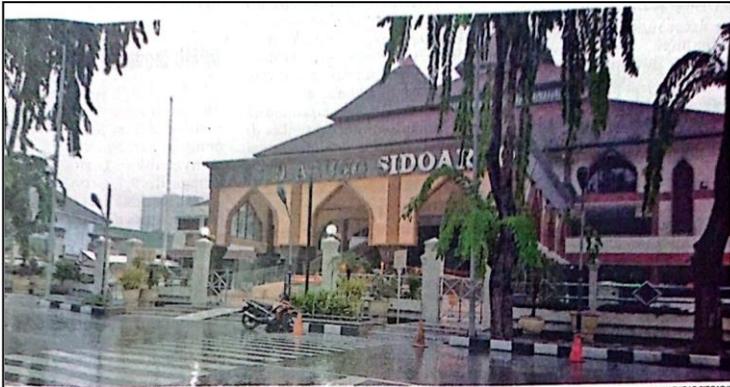


BERITA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat 3 Januari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



IKON: Masjid Agung Sidoarjo akan diperbaiki untuk meningkatkan fasilitas bagi jamaah.



TEGAS: Kondisi Balai Desa Gilang Kecamatan Taman pasca kasus dugaan pungli PTSL.

Masjid Agung Akan Direhab Tahun Ini

KOTA-Masjid Agung Sidoarjo dijadwalkan menjalani rehabilitasi tahun ini untuk meningkatkan kenyamanan para jamaah. Proses persiapan sudah memasuki tahap lelang.

Asisten Pembk Sidoarjo Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Muhammad Mahmud, mengungkapkan bahwa proses lelang telah mencapai tahap pengumuman pascakualifikasi.

"Lelang dimulai awal tahun ini agar proses rehabilitasi dapat segera berjalan," ujar Mahmud, Kamis (2/1).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk rehabilitasi masjid yang menjadi ikon Kota Delta tersebut.

Rehabilitasi akan mencakup beberapa bagian penting. Perbaikan pagar, pemasangan payung peneduh, serta penataan taman di sekitar masjid menjadi prioritas utama.

"Pada area terbuka di samping ma-

sjid, akan dipasang kanopi membran sebagai pelindung dari panas dan hujan," jelas Mahmud.

Selain itu, pengecatan ulang direncanakan untuk memperbaiki tampilan masjid agar tetap indah dan tidak kusam. Sistem drainase di area masjid juga akan diperbaiki untuk mencegah genangan air.

"Dengan penataan dan perbaikan ini, kami berharap jamaah merasa lebih nyaman dan betah beribadah di Masjid Agung," tutupnya. (sai/vga)

DPMD Ingatkan Kades Tak Lakukan Pungli

KOTA-Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Sidoarjo terjerat kasus hukum. Mereka diduga melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penyalahgunaan aset desa.

Kasus ini melibatkan beberapa Kades, seperti Kepala Desa Gilang (S) dan Kepala Desa Trosobo (HA) di Kecamatan Taman, yang terseret dalam dugaan pungli PTSL.

● Ke Halaman 10



Tim Gega Evakuasi Koper Misterius di SPBU Porong

Targetkan Keaktifan Peserta 80% di Tahun 2025

SIDOARJO - Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk komitennya dalam mendukung keberlangsungan Program Jamilun Kesehatan Nasional (JKN) melalui perpanjangan perjanjian kerja sama untuk peserta dari segmen Pekerja Bukan Pemera Upah (PBBU) dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munah, mengatakan bahwa sinergitas dan komunikasi yang dijalankan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sudah berjalan dengan sangat baik dan efektif.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo atas komitmen dan kerja sama yang telah dijalankan hingga saat ini. Sinergitas ini akan kami jaga dengan baik demi keberlangsungan Program JKN, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo," ujar Asisten Bidang Peningkatan Perjanjian Kerja Sama dan Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, saat ditemui di Kantor Bupati Sidoarjo, Kamis (2/1).

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Perjanjian Kerja Sama dan Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Mahmud, mengatakan bahwa sinergitas dan komunikasi yang dijalankan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sudah berjalan dengan sangat baik dan efektif.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo atas komitmen dan kerja sama yang telah dijalankan hingga saat ini. Sinergitas ini akan kami jaga dengan baik demi keberlangsungan Program JKN, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo," ujar Asisten Bidang Peningkatan Perjanjian Kerja Sama dan Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, saat ditemui di Kantor Bupati Sidoarjo, Kamis (2/1).

DETEKSI KHUSUS: Tim Gega dan Satbrimob Polda Jatim di lokasi koper yang ditinggalkan pemiliknya pada Rabu (1/1) malam di SPBU Arteri Porong.

SIDOARJO - Sebuah koper yang ditinggalkan pemiliknya di depan kafe SPBU di Jalan Raya Arteri Porong pada Rabu (1/1) malam mengundang kekhawatiran. Kemarin (2/1), tim Gega dan Satbrimob Kompi 3 Batalyon A Poldaja Timur datang untuk meng-evakuasi koper tersebut.

"Itu yang diamankan koper yang ditinggal sejak Rabu (1/1) malam oleh sejumlah orang," kata petugas keamanan SPBU Dwiak saat ditemui di lokasi kemarin.

Berdasar rekaman CCTV di SPBU, saat itu ada mobil yang berhenti dan menurunkan koper tersebut. Mobil berhenti di depan toilet. Sejumlah pria yang keluar lantas tampak mengecek mesin mobil.

Lalu, satu orang lagi menge-

KELANA JATIM 3.450 Non ASN Sidoarjo Mendaftar Seleksi PPPK Tahap II

SIDOARJO, Bhirawa - Pendaftaran PPPK di Kabupaten Sidoarjo, untuk tes tahap II, data per Hari Kamis (2/1) kemarin, jumlah sementara ada 3.450 an. Pendaftaran akan ditutup pada 7 Januari 2025. Pada tahap II ini pelaksanaan tes akan dilakukan pada Bulan Maret 2025 nanti.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Sidoarjo, Farida Puspitasari SKOM, menyampaikan hasil tes tahap I seleksi PPPK di Kabupaten Sidoarjo telah diumumkan pada Selasa 31 Desember 2024 lalu.

"Dari tes tahap I dan tes tahap II nanti, total formasi yang akan kita ambil adalah 1.165 orang," kata Farida, Kamis (2/1) kemarin, di kantornya.

Pendaftaran untuk tes tahap II, kata Farida, yang semula berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, oleh BKN diperpanjang sampai 7 Januari 2025.

"Sudah kita infokan kepada non ASN Sidoarjo," katanya. Dari formasi yang dibutuhkan sebanyak 1.165 pada tahun 2024 itu, kata Farida, sebanyak 400 formasi untuk tenaga guru, 400 formasi untuk tenaga kesehatan dan 365 formasi untuk tenaga teknis.

"Hasil tes tahap I sudah kita umumkan," kata Farida. Saat tes tahap I, jumlah non ASN Sidoarjo yang ikut mendaftar ada sebanyak 1.900 an. Mereka yang tidak bisa mendaftar pada tahap I tersebut, bisa mendaftar pada tes tahap II. (kns.dre)



BKD Sidoarjo, Budi Basuki, ketika mengawasi tes seleksi PPPK Sidoarjo tahap I.

Pelantikan Kepala Daerah Maret

Tunggu Informasi dari KPU RI dan Pemerintah

SERANG, SERA - Komisioner KPU RI M Rifqinizam Karasyuda akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karasyuda dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (13/1) malam.

Karasyuda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karasyuda dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (13/1) malam.

Karasyuda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karasyuda dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (13/1) malam.

Karasyuda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karasyuda dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (13/1) malam.

Karasyuda akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karasyuda dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (13/1) malam.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

kempalan



kempalanews

kempalanmanca

Kempalanbis

ken

KEMPALANEWS

Petugas PDAM Sidoarjo Siaga Selama Libur Nataru



Kempalan News



3 Januari 2025 12:35 am · waktu baca 2 menit



Supadi bersama tim operasional tengah mengerjakan saluran pipa yang bocor menuju pelanggan di Perum Grand Rose Regency Kemiri Sidoarjo (Foto : M Fasichullisan)

SIDOARJO KEMPALAN : Selama libur

Nataru petugas PDAM Delta Tirta Sidoarjo

...natura, petugas IPDA dan DPA di Kabupaten Sidoarjo tetap berada dalam kesiagaan penuh untuk memastikan kelancaran operasional pasokan air di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai bagian



Mulai dari petugas pompa booster, petugas IPDA, pelayanan cabang, security, tim



kempalan



kempalanews

kempalanmanca

Kempalanbis

ken

Mulai dari petugas pompa booster, petugas IPDA, pelayanan cabang, security, tim pengaduan 24 jam, petugas pencatat meter air hingga petugas operasional.

Salah satu fokus utama dari kesiagaan ini adalah menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan air kepada pelanggan. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk menekan jumlah kebocoran air serta menangani komplain pelanggan dengan cepat dan efektif.



Rumah Sunat Surabaya



0



0



Buy ... 12.00

Rute





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



kempalan



kempalanews

kempalanmanca

Kempalanbis

ken

Petugas Operasional PDAM Sidoarjo Supadi mengatakan, sebagai petugas kapan pun tim operasional siap siaga jika menerima laporan tentang permasalahan layanan PDAM. Tak terkecuali kebocoran pipa saluran menuju ke pelanggan yang di alami warga Perum Grand Rose Regency.



美容業界でキャリアアップ! 日本全国の求人情報

美容の仕事に情熱を持つあなたに、全国のトップサロンからの求人案内。キャリアの可能性を広げましょ...

Sponsored by: Search Beauty Jobs

[LEARN MORE](#)

capaian kinerja dan pelayanan kepada pelanggan melalui call center 24 jam pada Kamis 02 Januari pukul 12.05 WIB. Bahwa ada pipa bocor di Perum Grand Rose Regency Blok D 51 dan 52 Kemiri Sidoarjo. Ia pun



0



0



⋮

dan tanggap langsung turun ke lapangan



kempalan



kempalanews

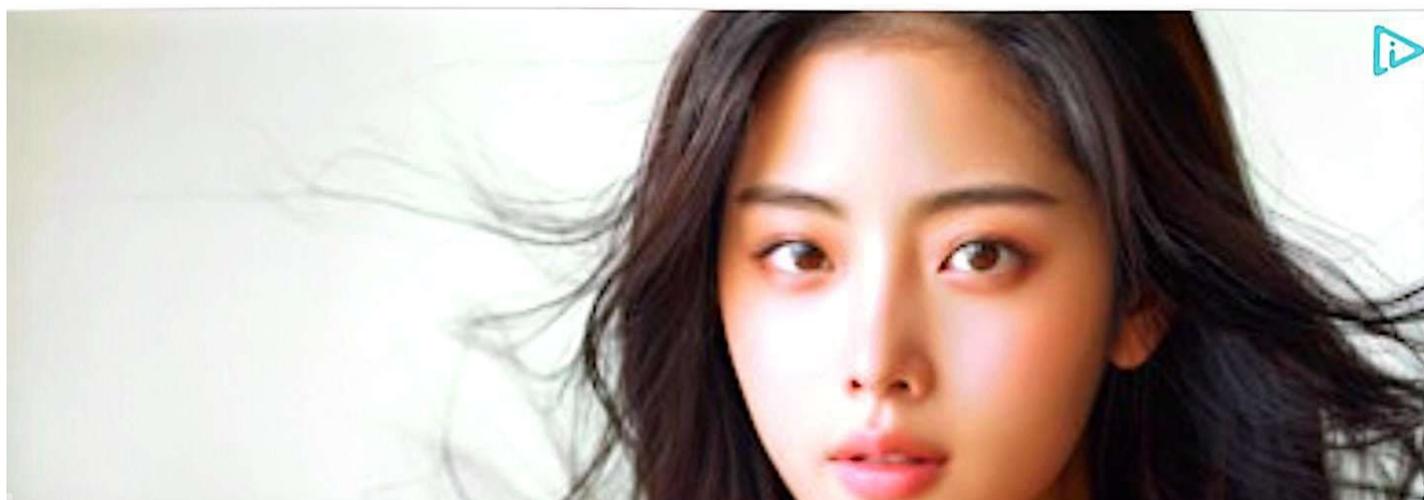
kempalanmanca

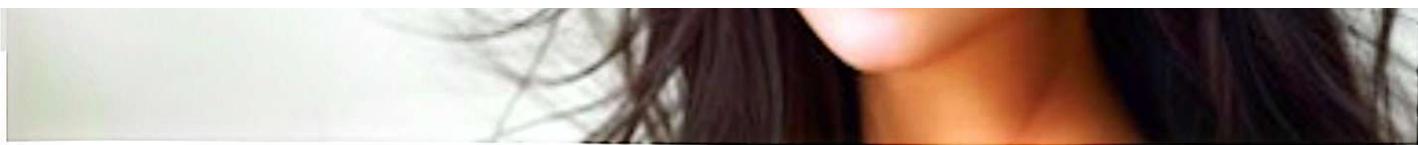
Kempalanbis

ker

Blok D 51 dan 52 Kemiri Sidoarjo. Ia pun bersama petugas operasional dengan cepat dan tanggap langsung turun ke lapangan sekaligus mengambil tindakan dengan pengerjaan seperti yang di laporkan oleh pelanggan.

Tim operasional dengan cepat dan tepat bahkan dua laporan pipa bocor yang menuju ke pelanggan tidak sampai 3 Jam pekerjaan sudah selesai. Dan pelanggan sudah terlayani dengan baik dan lancar.





라섹 수술 비용 안양에서 간편 확인

안양에서 라섹 수술을 고려 중이라면, 지금 비용 확인하세요

Sponsored by: Search Ads

[LEARN MORE](#)

Menurut tim operasional PDAM cabang



0



0



aman selama libur natal dan tahun baru





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



kempalan



kempalanews

kempalanmanca

Kempalanbis

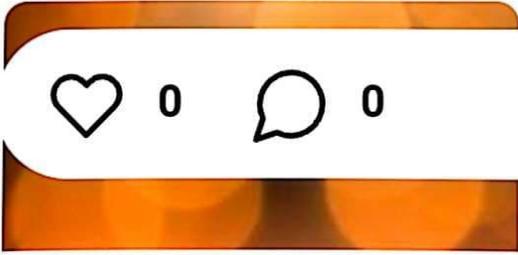
ken

Menurut tim operasional PDAM cabang Sidoarjo Supadi, agar pasokan air dipastikan aman selama libur natal dan tahun baru timnya terus memantau secara jeli dan akurat.

“Kami memahami bahwa selama masa mudik Nataru petugas yang bertugas tetap waspada demi kelancaran pasokan air ke pelanggan,” ujarnya.

Dengan demikian, PDAM Delta Tirta khususnya Tim operasional berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah situasi libur Nataru. Upaya-upaya ini juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kami dalam menjaga kelancaran dan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat khususnya Sidoarjo.(Ambari Taufiq /M Fasichullisan).

Kempalpagi



Tim Gegana Evakuasi Koper Misterius di SPBU Porong

SIDOARJO – Sebuah koper yang ditinggalkan pemiliknya di depan kafe SPBU di Jalan Raya Arteri Porong pada Rabu (1/1) malam mengundang kekhawatiran. Kemarin (2/1), tim Gegana dan Satbrimob Kompi 3 Batalyon A Polda Jawa Timur datang untuk mengevakuasi koper tersebut.

"Itu yang diamankan koper yang ditinggal sejak Rabu (1/1) malam oleh sejumlah orang," kata petugas keamanan SPBU Dwiki saat ditemui di lokasi kemarin.

Berdasar rekaman CCTV di SPBU, saat itu ada mobil yang berhenti dan menurunkan koper tersebut. Mobil berhenti di depan toilet. Sejumlah pria yang keluar lantas tampak mengecek mesin mobil.

Lalu, satu orang lagi menge-

luarkan koper berwarna hitam dengan aksen abu-abu dari kursi penumpang. "Itu sekitar pukul 23.00. Nah terus di CCTV mobil tersebut pergi meninggalkan koper. Di sini sekitar delapan menit saja," paparnya.

Hingga pukul 05.00, koper tersebut belum juga diambil pemiliknya. "Kami telepon polisi untuk memastikan," imbuhnya.

Proses evakuasi selesai pukul 13.00. Anggota Gegana kemudian melakukan pengecekan dengan alat khusus. Dari informasi yang dihimpun, diketahui bahwa koper tersebut berisi banyak kabel *charger* dan pakaian. Sementara itu, Kapolsek Porong Kompol Ari Priambodo saat dikonfirmasi mengenai dugaan koper misterius tersebut belum bisa memberikan keterangan. (eza/fal)



AHMAD REZA/JAWA POS

DETEKSI KHUSUS: Tim Gegana dan Satbrimob Polda Jatim di lokasi koper yang ditinggalkan pemiliknya pada Rabu (1/1) malam di SPBU Arteri Porong.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sambut HUT Ke-166, Pemkab Bebaskan Denda Pajak Daerah

SIDOARJO - Warga Kota Delta mendapat kesempatan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak daerah. Menyambut Hari Jadi ke-166 Sidoarjo pada 31 Januari, Pemkab Sidoarjo kembali memberikan fasilitas tersebut. Pembebasan berlangsung dari 1 Desember 2024 hingga 28 Maret 2025.

Pemeriksa pajak ahli muda Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Surendro Nurbawono mengatakan, pembebasan diberikan untuk wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sampai masa pajak 2024 dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2023. Untuk wajib pajak yang belum membayar pajak daerah lainnya seperti pajak reklame, pajak air tanah, dan lainnya juga diberikan penghapusan denda sampai masa pajak tahun 2023 dan masa pajak Januari sampai

Oktober 2024. "Dalam rangka Hari Jadi Sidoarjo, untuk tahun ini juga ada pembebasan denda pajak daerah," katanya.

Plt Kepala BPPD Sidoarjo Abu Dardak menambahkan, selain meringankan beban wajib pajak, upaya tersebut diharapkan semakin mendorong warga untuk taat pajak

Dengan begitu, realisasi pencapaian pajak daerah bisa sesuai target pada tahun ini. Apalagi, target pencapaian pajak tahun ini dipatok tinggi mencapai Rp 1,69 triliun. "Lewat upaya seperti ini dan sosialisasi intensif, harapannya ketaatan (wajib pajak) semakin tinggi," katanya. (uzi/fal)

Jawa Pos

KELANA JATIM

3.450 Non ASN Sidoarjo Mendaftar Seleksi PPPK Tahap II

Sidoarjo, Bhirawa

Pendaftar PPPK di Kabupaten Sidoarjo, untuk tes tahap II, data per Hari Kamis (2/1) kemarin, jumlah sementara ada 3.450 an. Pendaftaran akan ditutup pada 7 Januari 2025. Pada tahap II ini pelaksanaan tes akan dilakukan pada Bulan Maret 2025 nanti.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Sidoarjo, Farida Puspitasari SKom, menyampaikan hasil tes tahap I seleksi PPPK di Kabupaten Sidoarjo telah diumumkan pada Selasa 31 Desember 2024 lalu.

"Dari tes tahap I dan tes tahap II nanti, total formasi yang akan kita ambil adalah 1.165 orang," kata Farida, Kamis (2/1) kemarin, di kantornya.

Pendaftaran untuk tes tahap II, kata Farida, yang semula terakhir pada 31 Desember 2024 lalu, oleh BKN diperpanjang sampai 7 Januari 2025.

"Sudah kita infokan kepada non ASN Sidoarjo," katanya. Dari formasi yang dibutuhkan sebanyak 1,165 pada tahun 2024 itu, kata Farida, sebanyak 400 formasi untuk tenaga guru, 400 formasi untuk tenaga kesehatan dan 365 formasi untuk tenaga teknis.

"Hasil tes tahap I sudah kita umumkan," kata Farida. Saat tes tahap I, jumlah non ASN Sidoarjo yang ikut mendaftar ada sebanyak 1.900 an. Mereka yang tidak bisa mendaftar pada tahap I tersebut, bisa mendaftar pada tes tahap II. [kus.dre]



BKD Sidoarjo, Budi Basuki, ketika mengawasi tes seleksi PPPK Sidoarjo tahap I.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pelantikan Kepala Daerah Maret

► Tunggu Informasi dari KPU RI dan Pemerintah

SURABAYA, SURYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan saat ini belum mendapat informasi resmi mengenai rencana mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Sehingga, KPU Jatim pun masih menunggu informasi pasti dari KPU RI dan pemerintah mengenai jadwal pelantikan hasil Pilkada Serentak 2024.

Sedianya, mengacu Perpres 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dimulai pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati/wali kota. Namun, pelantikan bakal mundur pada Maret mendatang. "Kami belum mendapat informasi itu," kata Komisaris KPU Jatim Choirul Umam saat dikonfirmasi, Kamis (2/1). Umam menge-

takan, KPU RI belum memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya terkait dengan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Hanya saja, Umam menyebutkan bahwa urusan pelantikan sebenarnya sudah menjadi ranah pemerintah. Bukan merupakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. "Walaupun pelantikan memang sudah menjadi wilayah pemerintah," jelas Umam.

Potensi mundurnya pelantikan kepala daerah sebelumnya telah bergulir dan sempat dijelaskan oleh pemerintah. Namun terbaru, rencana itu dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinuzam Karsayuda. Dikutip dari *Tribunnews.com*, Rifqi mengatakan, pengunduran pelantikan kepala daerah itu lantaran MK baru menyele-

saikan seluruh perselisihan hasil pilkada pada 13 Maret 2025. "Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," ujar Rifqi.

Meski begitu, dia menjelaskan daerah yang tidak terdapat sengketa hasil pilkada pun juga dipastikan pelantikannya tetap akan ditundur pada 13 Maret 2025. Sebab, seluruh pelantikan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. "Itulah prinsip dasar pilkada serentak, karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK, makanya pelantikannya 13 Maret 2025," pungkasnya.

Namun, Rifqinuzam mengungkapkan, pengunduran jadwal pelantikan tersebut

akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru. Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025. "Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden," kata Rifqinuzam.

Akan koordinasi

Terpisah, pihak KPU Kota Malang belum menetapkan tanggal pelantikan wali kota terpilih bersama pasangannya. Saat ini, KPU Kota Malang sedang melakukan evaluasi internal dan eksternal. Termasuk mempersiapkan diri menghadapi gugatan di MK.

Ketua KPU Kota Malang M Toiyb menjelaskan sejauh ini belum ada penetapan hari pelantikan. Pihaknya juga



KETUA KOMISI II DPR RI M RIFQINUZAM KARSAYUDA

belum ada koordinasi lanjut dengan Pemkot Malang pasca penetapan hasil Pilkada 2024 Kota Malang.

KPU Kota Malang akan berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk menentukan jadwal pelantikan. Nantinya, Pemkot Malang juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. "Saat ini,

kami fokus menyusun laporan pertanggungjawaban kemudian persiapan di MK dan evaluasi di internal maupun

eksternal," katanya.

Komisaris KPU Kota Malang Nur El Fathi memaparkan, penentuan hari pelantikan kemungkinan besar akan dipilih setelah ada putusan MK KPU Kota Malang akan menghadapi gugatan pilkada di level wali kota dan gubernur.

Dijelaskan Fathi, KPU Kota Malang, KPU RI, Bawaslu Kota Malang dan Bawaslu RI sedang menunggu elektronik buku registrasi

perkaranya konstitusi di MK. KPU Kota Malang juga mempersiapkan diri (balai) nanti persidangan digelar. "Pada prinsipnya, kami tunggu dulu putusan MK, sejauh ini belum tahu jadwalnya kapan, kalau proses selesai, maka ketetapan dilakukan, baru kami bisa melakukan penetapan," ungkapnya.

"Jadi saat ini kan berkaca apakah berkas memenuhi syarat atau tidak, kalau memenuhi syarat permohonan dipanggil. Kami menyiapkan bukti. Penjadwalan sidang, proses sidang, menghadirkan saksi, seperti proses di MK pada umumnya, sampai akhirnya nanti pembacaan putusan," ujarnya.

KPU Kota Malang belum bisa memastikan berapa lama jika proses di MK terjadi. Fathi berpendapat, KPU Kota Malang telah melaksanakan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. **(yus/bai)**

SURYA
2018-2024



Perpanjangan kerja sama program JKN Pemkab dengan BPJS

Targetkan Keaktifan Peserta 80% di Tahun 2025

SIDOARJO - Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membuktikan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perpanjangan perjanjian kerja sama untuk peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas tiga.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munaqib, mengatakan bahwa sinergitas dan komunikasi yang dijalankan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sudah berjalan dengan sangat baik dan efektif.

"Kami ucapkan terima kasih serta mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo atas komitmen dan kerja sama yang telah dijalankan hingga saat ini. Sinergitas ini akan kami jaga dengan baik demi keberlangsungan Program JKN, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo," ujarnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Daerah, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan OPD terkait yang menjalin kerja sama meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja. Munaqib menekankan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih berstatus Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off dengan cakupan keaktifan peserta sejumlah 1.545.863

jiwa atau 77,18%.

"Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah mendaftarkan warganya menjadi peserta PBPU BP Pemda kelas tiga sebanyak 164.599 jiwa. Kami harap di tahun 2025 tingkat keaktifan pesertanya dapat mencapai 80%. Tentu saja, hal itu memerlukan strategi serta sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan," harapnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rohman, mengatakan bahwa Program JKN merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, sehingga program ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

"Ini merupakan tahun ketiga kita dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Tentunya mempertahankan itu lebih sulit, tapi dengan keyakinan, kerja keras, dan kerja sama, kami yakin bahwa Program JKN di Kabupaten Sidoarjo akan terus dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang," kata Ainur.

Lebih lanjut, Ainur menegaskan bahwa semua pihak harus memahami isi dari perjanjian kerja sama ini. Ia juga berpesan agar dalam pelaksanaannya, semua pihak memperhatikan hal ini secara bersama-sama. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah tentang validitas dan keakuratan data.

"Saya berpesan kepada pihak terkait agar memahami hak dan

kewajibannya, sehingga itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perjanjian kerja sama ini menjadi dasar kita dalam melaksanakan program ini, serta menjadi benteng untuk semuanya. Jika ada hal yang perlu disesuaikan, kita akan lakukan itu bersama-sama," pesannya.

Menurutnya, Program JKN ini menjadi tanggung jawab bersama dan sebisa mungkin harus berjalan secara efektif dan efisien. Pihaknya sangat mendukung program JKN ini karena sudah banyak masyarakat yang terbantu berkat program ini.

"Jika ada hal yang sudah pasti, tidak perlu diperdebatkan, yang penting bagaimana kita mengefektifkan demi keberlangsungan program ini. Kita semua tahu bahwa sudah banyak yang tertolong dari program ini, terutama dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan," bebernya.

Di akhir, ia berpesan kepada pihak terkait dengan pelayanan kesehatan agar dapat menjaga kualitas layanan dan bahkan meningkatkan kualitasnya. Hal ini tentunya demi kepuasan masyarakat dan profesionalisme dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Pentingnya layanan kesehatan yang diberikan kepada warga masyarakat Sidoarjo merupakan prioritas kami. Muaranya adalah bagaimana peningkatan kualitas layanan serta kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ini dapat terus terjaga," tutupnya. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIKY PUTRA SANSIRI/RADAR SIDOARJO

TEGAS: Kondisi Balai Desa Gilang Kecamatan Taman pasca kasus dugaan pungli PTSL.

DPMD Ingatkan Kades Tak Lakukan Pungli

KOTA-Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Sidoarjo terjerat kasus hukum. Mereka diduga melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penyalahgunaan aset desa.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Kades, seperti Kepala Desa Gilang (S)

dan Kepala Desa Trosobo (HA) di Kecamatan Taman, yang terseret dalam dugaan pungli PTSL.

● Ke Halaman 10



DPMD Ingatkan Kades...

Selain itu, Kepala Desa Tambak Sawah di Kecamatan Waru (IF) terlibat dalam penyalahgunaan pengelolaan Rusunawa yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 9,7 miliar.

Praktik tidak terpuji ini mendapat respons tegas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo. Plt Kepala DPMD Sidoarjo, Probo Agus, mengingatkan para kades untuk tidak menyalahgunakan aset desa maupun melakukan pungli.

"Kami sudah berulang kali mengingatkan semua kades, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui

surat edaran, untuk mematuhi aturan yang berlaku," ujar Probo Agus, Kamis (2/1).

Menurutnya, pemanfaatan aset desa sudah diatur dengan jelas, termasuk dalam pelaksanaan program PTSL yang merupakan program nasional dengan biaya yang telah ditetapkan. "Kami juga menegaskan agar tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan," tambahnya.

Probo menjelaskan bahwa DPMD telah menyediakan berbagai saluran konsultasi untuk membantu para kades memahami dan mematuhi aturan. Saluran tersebut meliputi klinik BUMDes dan Klinik Siskeudes, yang dapat dimanfaatkan oleh Kades

maupun Camat.

"Kami berharap para kades memanfaatkan fasilitas ini untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan aset desa dan program lainnya," ujarnya.

Probo mengingatkan bahwa kasus pungli PTSL bukanlah yang pertama terjadi. Oleh karena itu, para Kades diharapkan dapat belajar dari kasus sebelumnya dan menjalankan tugas sesuai aturan demi kepentingan masyarakat desa.

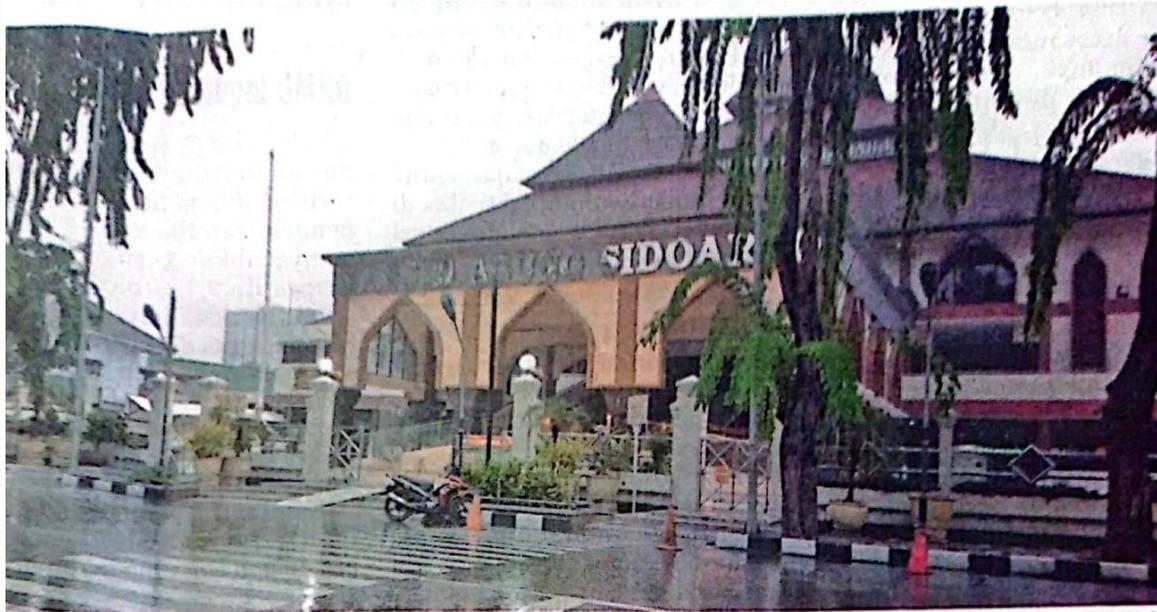
"Kami terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pengawasan agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



IKON:
Masjid Agung
Sidoarjo akan
diperbaiki
untuk
meningkatkan
fasilitas bagi
jamaah.

M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

Masjid Agung Akan Direhab Tahun Ini

KOTA-Masjid Agung Sidoarjo dijadwalkan menjalani rehabilitasi tahun ini untuk meningkatkan kenyamanan para jamaah. Proses persiapan sudah memasuki tahap lelang.

Asisten Pemkab Sidoarjo Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Makhmud, mengungkapkan bahwa proses lelang telah mencapai tahap pengumuman pascakualifikasi.

“Lelang dimulai awal tahun ini agar proses rehabilitasi dapat segera berjalan,” ujar Makhmud, Kamis (2/1).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk rehabilitasi masjid yang menjadi ikon Kota Delta tersebut.

Rehabilitasi akan mencakup beberapa bagian penting. Perbaikan pagar, pemasangan payung peneduh, serta penataan taman di sekitar masjid menjadi prioritas utama.

“Pada area terbuka di samping ma-

sjid, akan dipasang kanopi membran sebagai pelindung dari panas dan hujan,” jelas Makhmud.

Selain itu, pengecatan ulang direncanakan untuk memperbarui tampilan masjid agar tetap indah dan tidak kusam. Sistem drainase di area masjid juga akan diperbaiki untuk mencegah genangan air.

“Dengan penataan dan perbaikan ini, kami berharap jamaah merasa lebih nyaman dan betah beribadah di Masjid Agung,” tutupnya. (sai/vga)

